



Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau



RANWAL 2023

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Gedung C2 Lantai 2 Dompak laut
Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau
Email : blhkepri@yahoo.co.id
Website : dlhk.kepriprov.go.id

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan peraturan diatas Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integrative dan spasial

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan perencanaan tahunan yang mengacu pada Renstra OPD yang memuat tentang strategi dan kebijakan yang tertuang dalam program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang RPJMD sebagai input RKPD yang nantinya akan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran sebagai pedoman penyusunan APBD.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran pertama yaitu : Mewujudkan Penurunan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diperoleh dari : (1) Indeks Kualitas Air Bersih, (2) Indeks Kualitas Udara, (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan, (4) Indeks Kualitas Air Laut.

Sasaran kedua yaitu : Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari dengan indikator kinerja : Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan, Rehabilitasi Lahan Kritis, Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat dan Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau

Sasaran ketiga yaitu : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indikator kinerja : Nilai Sakip.

Untuk mendukung **pencapaian sasaran pertama** diperlukan strategi Mendorong pemanfaatan ruang yang peka terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, dengan arah kebijakan : (1) Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut, (2) Pelaksanaan: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim, Pengelolaan limbah sluge Oil di Kawasan Pesisir.

Untuk mendukung **pencapaian sasaran kedua** diperlukan strategi dengan cara Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemar, dengan arah kebijakan : (1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung (2) Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi, (3) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH, (4) Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat dan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara (5) Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (6) Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan (7) Pelaksanaan Pembinaan

terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasi Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, (8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Kehutanan, (9) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan, (10) Pengembangan Perhutanan Sosial, (11) Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS

Untuk mendukung **pencapaian sasaran ketiga** diperlukan strategi Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan arah kebijakan : (1) Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, (2) Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional yang dalam hal ini Kementerian Pertanian RI. Oleh karenanya, substansi Renja harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat kab/kota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Instruksi Presiden RI No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Goverment;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016 – 2021;
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau).

1.3 Maksud Dan Tujuan

- 1.3.1 Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 adalah sebagai berikut :
- 1 Memberikan arah bagi seluruh jajaran manajemen Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat;
 - 2 Sebagai dokumen perencanaan satu tahun guna membangun kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.
- 1.3.2 Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1. Penjabaran tahunan dari perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra.
 2. Sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika penyusunan Renja.

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
	Pada bab ini menguraikan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, permasalahan/hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN
	Pada bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional dan memuat tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN
	Pada bab ini mengemukakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana
BAB V	PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2021 mengelola anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. **23.364.247.361,-** realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. **21.759.528.915,-** atau **93.13 %** dari pagu anggaran. Sedangkan pagu anggaran belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 berjumlah sebesar Rp. **9.192.963.410,-**, realisasi sampai dengan 31 Desember 2021, sebesar Rp. **7.916.811.826,76,-** atau 86,11%. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan dan APBD Provinsi Kepulauan Riau. Adapun realisasi anggaran per 31 Desember 2021 sebagaimana pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2021

NO	Uraian	Paguanggaran	Realisasi	Capaian
1	Belanjatidaklangsung	23.364.247.361	21.759.528.915	93.13 %
	-Belanjapegawai	23.284.247.361	21.679.528.915	93.11 %
2	Belanjalangsung	9.192.963.410	7.916.811.826	86,11 %
	Total	32.557.210.771	29.676.441.141,76	91.15%

Sedangkan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 untuk masing-masing program/ kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel T-C.29.
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
 Provinsi Kepulauan Riau

Nama perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)
2				BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							
2	11			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI							
2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN						
2	11	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah						
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan							

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)	
				Pemerintah Daerah									
2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	11	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	11	02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	N/a	N/a	100	N/a	100 %	100 %		
2	11	02	1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	N/a	N/a	0	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen		
2	11	02	1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi	N/a	N/a	1	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen		
2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut	N/a	N/a	76,10	N/a	76,75	76,75		
					Indeks Kualitas Air	N/a	N/a	56,60	N/a	56,70	56,70		
					Indeks Kualitas Udara Ambien	N/a	N/a	88,14	N/a	88,25	88,25		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/a	N/a	59,07	N/a	59,08	59,08		
2	11	03	1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	N/a	N/a	1	N/a	1 Laporan	1 Laporan		
2	11	03	1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan	Terkendalinya Penanganan Akibat Limbah Sludge Oil di	N/a	N/a	1	N/a	1 Paket	1 Paket		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=[10/4]	
				Lingkungan Hidup	Wilayah Pesisir								
2	11	03	1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup	N/a	N/a	1	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen		
2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	N/a	N/a	0	N/a	14.28 Dokumen	14.28 Dokumen		
2	11	04	1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	N/a	N/a	0	N/a	1 Dokumen	1 Dokumen		
2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	N/a	N/a	26,67	N/a	33 %	33 %		
2	11	05	1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Ternilainya Pengelolaan Limbah B3 terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki	N/a	N/a	50	93,3	20 Perusahaan	20 Perusahaan		
2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	N/a	N/a	100	N/a	100 %	100 %		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)	
				LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)									
2	11	06	1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dibinadan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	N/a	N/a	35	N/a	5 Perusahaan	5 Perusahaan		
2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	N/a	N/a	28,57	N/a	42,85 %	42,85 %		
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Adipura	N/a	N/a	0	N/a	5 Kab/Kota	5 Kab/Kota		
2	11	08	1.01		Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tingkat Provinsi dan atau tingkat Nasional	N/a	N/a	0	N/a	10 Sekolah	10 Sekolah		
					Jumlah orang yang mendapat penghargaan Kalpataru	N/a	N/a	0	N/a	1 Paket	1 Paket		
2	11	09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Percentase Perusahaan yang Taat Aturan	N/a	N/a	100	N/a	100 %	100 %		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)	
2	11	09	1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	N/a	N/a	100	N/a		100 %	100 %	
2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup						57,14 %	57,14 %	
2	11	10	1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	N/a	N/a	7	N/a		7 Kasus	7 Kasus	
2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	N/a	N/a	27	N/a		26 %		
					Persentase Penanganan Sampah	N/a	N/a	74	N/a		73 %		
2	11	11	1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA	N/a	N/a	1	N/a		1 Paket		
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	28	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
3	28	03		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah)	N/a	N/a	27	0,01		27 %	27 %	
					Rehabilitasi Lahan Kritis	N/a	N/a	5	145,0		5 Ha	5 Ha	
3	28	03	1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di	N/a	N/a	0	N/a		1 Tahun	1 Tahun	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)			
1		2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)	
				(KPH) Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau								
3	28	03	1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Perencanaan di KPH	N/a	N/a	1	N/a	0 Dokumen	0 Dokumen		
3	28	03	1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	N/a	N/a	0	N/a	1 Paket	1 Paket		
3	28	03	1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terperluinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	N/a	N/a	1	N/a	0 Paket	0 Paket		
3	28	03	1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	N/a	N/a	1	N/a	1 Tahun	1 Tahun		
3	28	03	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	N/a	N/a	1	N/a	0 Paket	0 Paket		
3	28	03	1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ /Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m ³ / Tahun	N/a	N/a	1	N/a	1 Paket	1 Paket		
3	28	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	N/a	N/a	500	N/a	500 Ha	500 Ha		
3	28	05	1.01	Pelaksanaan	Terlaksananya	N/a	N/a	6	N/a	6 KPH	6 KPH		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah s/d tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+6+9)	11=(10/4)
				Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan								
3	28	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	N/a	N/a	2	N/a		2 DAS	2 DAS	
3	28	06	1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota	N/a	N/a	0	N/a	1 Kab/Kota	1 Kab/Kota		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau telah merealisasikan capaian kinerja masing-masing program/kegiatan rata-rata **100%** dan realisasi keuangan rata- rata 97,07 %.

Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

A. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Lingkungan Hidup dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Tidak tercapainya target pemantauan kualitas air melalui kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, hal ini disebabkan karena terjadinya refocusing anggaran sehingga jumlah titik pemantauan tidak tercapai sesuai target yang telah direncanakan. Adapun tingkat capaian kinerja dan Realissasi Anggaran hanya 42,86%.
2. Tidak tercapainya secara optimal kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Jumlah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang ditangani dibagi Jumlah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Dengan sub kegiatan Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator terangkutnya Limbah B3 Akibat Tumpahan Minyak di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini karenakan terjadinya refocusing anggaran, sehingga jumlah Limbah B3 yang ada di beberapa Kab/ Kota tidak dapat terangkut sesuai target yang telah ditetapkan. . Adapun tingkat capaian kinerja dan Realissasi Anggaran hanya 78,15%.
3. Adanya Efisiensi Anggaran APBD di Tahun 2021 dan kurang bayar kegiatan yang mempengaruhi Segala Aspek Kinerja di Bidang Lingkungan Hidup

Solusi yang diambil terkait dengan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Aspek Anggaran Program/Kegiatan

- Melakukan Percepatan Belanja Barang/Jasa di tiap-tiap Program Kegiatan.
- Pencermatan dalam Penganggaran Kegiatan sehingga dampak efisiensi Anggaran tidak mempengaruhi Serapan anggaran maupun Output Kegiatan
- Mensinergiskan Program Kegiatan APBD 1, APBD 2, sehingga diharapkan permasalahan Tehnis di lapangan tidak terjadi.

2. Aspek Sarana Prasarana

- Tersedianya regulasi dalam rangka optimalisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup agar diberikan anggaran yang sesuai dengan frekuensi pemantauan berdasarkan peraturan yang ada.
- Meningkatkan jumlah instrumen atau fasilitas pemantauan kualitas air
- Pengadaan bahan – bahan kimia /reagensi, peralatan uji lapangan (insitu) serta peralatan pendukung lainnya.

3. Aspek Kualitas Air

- Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang ada agar lebih taat dengan peraturan yang berlaku khususnya di bidang lingkungan hidup melalui kegiatan pengawasan seperti Proper.
- Menambah jumlah waduk yang dipantau kualitas air.
- Menambah jumlah dan meningkatkan kapasitas petugas pengambilan contoh/ sample kualitas air.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait sebagai data sekunder.

B. URUSAN KEHUTANAN

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kehutanan dalam rangka pencapaian target kinerja pada tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha bidang kehutanan;
2. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam;

Berdasarkan hal itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau untuk urusan lingkungan hidup dan kehutanan telah menetapkan Kebijakan dalam mewujudkan kualitas lingkungan yang baik atau rendahnya tingkat pencemaran dan meningkatnya pemanfaatan hutan lestari yaitu :

- Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut
- Pelaksanaan: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim
- Pengelolaan limbah sluge Oil di Kawasan Pesisir
- Pengelolaan ruang terbuka hijau
- Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah b3
- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Penilaian dan Pemantauan, Pendampingan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau
- Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
- Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi

- Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
- Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat dan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
- Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
- Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan
- Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Kehutanan
- Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- Pengembangan Perhutanan Sosial
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah			100%	100%	100%	100%	N/a				
2	Indeks Kualitas Air Laut			76,1	76,75	77,39	78,04	N/a				
3	Indeks Kualitas Air			56,60	56,70	56,80	56,90	N/a				
4	Indeks Kualitas Udara Ambien			88,14	88,25	88,35	88,46	N/a				
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			59,07	59,08	59,09	59,10	N/a				
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau			0	14,28%	14,28%	28,57%	N/a				
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi			26,67%	33,33%	33,33%	40,00%	93,3				
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi			100%	100%	100%	100%	N/a				

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan			28,57%	42,85%	57,14%	71,43%	N/a				
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan			100%	100%	100%	100%	N/a				
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			57,14	57,14	71,43	71,43	N/a				
12	Persentase Pengurangan Sampah			24%	26%	27%	28%	N/a				
13	Persentase Penanganan Sampah			74%	73%	72%	71%	N/a				
14	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan			27,00	27,10	27,20	27,30	0,01				
15	Rehabilitasi Lahan Kritis (Ha)			5 Ha	5 Ha	10 Ha	10 Ha	145				
16	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat (Ha)			500 Ha	500 Ha	500 Ha	500 Ha	N/a				
17	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau (DAS)			2 DAS	2 DAS	2 DAS	2 DAS	N/a				

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mencatat ada beberapa permasalahan penting yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau ada beberapa isu penting yang harus diperhatikan yaitu :

1. Penurunan Kualitas Lingkungan (air, udara dan lahan).
 - Rendahnya tingkat ketataan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - Belum optimalnya penanganan pencemaran air yang disebabkan oleh perusahaan, minyakkopal, ataupun pribadi
 - Kualitas lingkungan hidup semakin berkurang dengan berkurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)
 - Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional
2. Rendahnya Nilai Produksi Kehutanan.
 - Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan
 - Pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Kepri belum optimal
 - Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi
 - Rendahnya optimalisasi dan koordinasi tentang peran hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan

- Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/ masyarakat) dimasa datang.

Permasalahan atau isu strategis pada urusan lingkungan hidup dan Kehutanan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air
2. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah
3. Potensi bencana alam dan perubahan iklim
4. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)

Relativ rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan isu penting identifikasi renstra kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diantaranya adalah :

1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional
3. Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam
4. Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup
5. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan
6. Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan hutan untuk meningkatkan nilai ekonomi maupun nilai lingkungan
7. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan

8. Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan
9. Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Visi Gubernur telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021 yaitu **Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlaq Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.** Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 9 misi, yang salah satunya adalah misi yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas dan fungsi yang mendukung pelaksanaan Misi ke-1 yaitu **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Dalam Rancangan awal Prioritas RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 telah ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan dengan Tema Pembangunan “ **Peningkatan kualitas Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, iklim investasi yang kondusif, dan Pemerataan Infrastruktur guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbudaya** “, yang dikaitkan dengan Prioritas RKP yaitu **Peningkatan daya saing ekonomi, dengan fokus pada pengembangan Koperasi dan UMKM; pengembangan industri pengolahan; pengembangan perdagangan; peningkatan profesionalisme tenaga kerja; peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya dan hasil olahan perikanan, pengembangan pariwisata bahari, dan pemerataan sarana prasarana perhubungan.**

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Provinsi Kepulauan Riau

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7I8	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		33.623.977.085						
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD		500.000.000						
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen							
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan							
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan							
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN		27.915.627.009						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/ Bulan							
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ASN		Pelaksanaan Tugas ASN								
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengadministrasi Barang Milik Daerah		50.000.000						
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen							
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan							
4	Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai		280.000.000						
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang							
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pangadministrasian Kantor		1.256.896.275						
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket							
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket							
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket							
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket							
e.	Penyediaan Barang	Provinsi	Jumlah Paket Barang	1 Paket							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Cetakan dan Penggandaan	Kepulauan Riau	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan								
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen							
g.	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket							
h.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan							
i.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan							
j.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen							
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah		804.452.401						
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit							
b.	Pengadaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket							
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit							
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			yang Disediakan								
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	1	1.931.051.800						
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan							
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan							
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan							
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan							
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		885.949.600						
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit							
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit							
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit	1 Unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			asi								
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah		157.909.600						
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH		57.909.046						
a.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen							
b.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen							
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi		100.000.000						
a.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun yang Disusun	1 Dokumen							
b.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen							
c.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pulau Kecil		Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun								
d.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen							
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kualitas Tutupan Lahan		146.096.046						
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup		76.096.046						
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen							
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen							
3	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Terkendalinya Penanganan Akibat Limbah Sludge Oil di Wilayah Pesisir		35.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan							
b.	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diiisolasi	1 Lokasi							
c.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik							
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup		35.000.000						
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen							
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen							
d.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen							
e.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen							
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)		Percentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau		73.280.296						
1	Pengelolaan Keanelekragaman Hayati Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau		73.280.296						
a.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanelekragaman Hayati	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen							
b.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Ha							
c.	Pengelolaan Kebun Raya	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Ha							
d.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Ha							
e.	Pengelolaan Taman	Provinsi	Luas Taman KEHATI	1 Ha							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kepulauan Riau	Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi								
f.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Orang							
g.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit							
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi		43.166.695						
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengawasan dan Ternilainya Pengelolaan Limbah B3 terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki		43.166.695						
a.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen							
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi		14.494.179						
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Perusahaan yang dibinadan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		14.494.179						
a.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan								
b.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang							
c.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan							
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen							
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan		207.627.507						
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat		207.627.507						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		penghargaan Adipura Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tingkat Provinsi dan atau tingkat Nasional Jumlah orang yang mendapat penghargaan Kalpataru								
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga							
b.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen							
c.	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1 Orang							
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan		40.167.383						
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau		40.167.383						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas							
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		35.354.432						
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan		35.354.432						
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3 Dokumen							
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah		64.240.266						
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Penanganan Sampah di TPA		64.240.266						
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen							
b.	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	1 Ton							
c.	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit							
d.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen							
e.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Regional yang Dilaksanakan								
f.	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	1 Ton							
g.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit							
XI	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah) Rehabilitasi Lahan Kritis		524.123.987						
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau		201.744.855						
a.	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen							
b.	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit							
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan di KPH	Dokumen	30.000.000						
a.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)										
b.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)										
c.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)										
d.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)										
e.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)										
f.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Anambas)										
3	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		90.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen							
b.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen							
c.	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen							
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen							
e.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan	1 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lindung								
f.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen							
g.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen							
h.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Provinsi Kepulauan Riau									
4	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		40.000.000						
a.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen							
b.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0,25 Ha							
c.	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0,25 Ha							
d.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Ha							
e.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	1 Unit							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
f.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Provinsi Kepulauan Riau		500							
g.	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Ha							
h.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan							
5	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan		110.000.000						
a.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1 Ha							
b.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1 Operasi							
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen							
d.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan gan Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan							
6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Provinsi Kepulauan Riau	Terkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		20.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(HHBK)										
a.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Provinsi Kepulauan Riau		1							
b.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Managemen							
c.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen							
d.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SIRPBPHH	1 Unit Managemen							
7	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1 Unit Managemen	32.379.132						
a.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu	3 Dokumen							
b.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah izin usaha atas Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	3 Dokumen							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah izin baru	1 Unit Managemen							
XII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat		184.330.575						
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan		184.330.575						
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Penyuluhan Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang							
b.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok							
c.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Ha							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau		36.640.149						
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota		36.640.149						
a.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	5.000.000						
b.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	5.000.000						
c.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Provinsi Kepulauan Riau		1 Dokumen	5.000.000						
d.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1 Orang	5.000.000						
e.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	5.000.000						
f.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau		2	11.640.149						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				30.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepergawainan Perangkat Daerah (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau			30.000.000						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau		2 Orang	30.000.000						
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kualitas Tutupan Lahan		20.000.000						
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup		20.000.000						
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	20.000.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				50.000.000						
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			30.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	5.000.000						
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	5.000.000						
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau		1	5.000.000						
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	10.000.000						
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,				10.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN										
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5.000.000						
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	5.000.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				40.000.000						
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			20.000.000						
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	20.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	5.000.000						
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau		1	5.000.000						
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	10.000.000						
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				10.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5.000.000						
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	5.000.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				50.000.000						
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			30.000.000						
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	30.000.000						
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit III Lingga)										
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	5.000.000						
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau		1	5.000.000						
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	10.000.000						
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				10.000.000						
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit III Lingga)										
	Penguanan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)]	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguanan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	5.000.000						
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	5.000.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				50.000.000						
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit IV Bintan- Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			30.000.000						
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	30.000.000						
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit IV Bintan- Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen							
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau		1	5.000.000						
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	10.000.000						
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				10.000.000						
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)										
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5.000.000						
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	5.000.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				55.000.000						
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			35.000.000						
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana (UPTD KPHP Unit V Natuna) Prasarana Operasionalisasi KPH	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	35.000.000						
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	5.000.000						
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau		1	5.000.000						
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	10.000.000						
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				10.000.000						
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	5.000.000						
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	5.000.000						
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				56.744.855						
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			36.744.855						
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas) Prasarana Operasionalisasi KPH	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	36.744.855						
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit VI	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	5.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kepulauan Anambas)										
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			5.000.000						
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau		1	5.000.000						
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau		4 Ha	10.000.000						
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				10.000.000						
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			10.000.000						

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	5.000.000						
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	5.000.000						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel T-C.32 sebagai berikut

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD		
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
b	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	
c	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN		
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/Bulan	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengadministrasi Barang Milik Daerah		
a	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
b	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau			
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Kepulauan Riau			
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
d.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
e.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	
g.	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	
h.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
i.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
j.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi Kepulauan Riau			
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	
b.	Pengadaan Mebel	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	
c.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau		1	
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Kepulauan Riau				
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	
c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Kepulauan Riau			
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	
c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah		
1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH		
a.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	
b.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	
2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi		
a.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun yang Disusun	1 Dokumen	
b.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	
c.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
d.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 Dokumen	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup		
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	
b.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
3	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Terkendalinya Penanganan Akibat Limbah Sludge Oil di Wilayah Pesisir		
a.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	
b.	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	1 Lokasi	
c.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	
3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup		
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	1 Dokumen	
d.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 Dokumen	
e.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	1 Dokumen	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau		
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau		
a.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	
b.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Ha	
c.	Pengelolaan Kebun Raya	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Ha	
d.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Ha	
e.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Ha	
f.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 Orang	
g.	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi		
1	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengawasan dan Ternilainya Pengelolaan Limbah B3 terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki		
a.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi		
1	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Perusahaan yang dibinadan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
a.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	
b.	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	
c.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	UNTUK MASYARAKAT				
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Adipura		
			Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tingkat Provinsi dan atau tingkat Nasional		
			Jumlah orang yang mendapat penghargaan Kalpataru		
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga	
b.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
c.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	1 Orang	
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan		
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau		
a.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup		
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	3 Dokumen	
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di	1 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan		Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAAHAN		Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah		
1	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Penanganan Sampah di TPA		
a.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen	
b.	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	1 Ton	
c.	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	
d.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen	
e.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	
f.	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	1 Ton	
g.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit	
XI	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah) Rehabilitasi Lahan Kritis		
1	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Provinsi Kepulauan Riau	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau		
a.	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 Dokumen	
b.	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	
c.	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan	Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan	1 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Kepulauan Riau	Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi		
2	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		
a.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	
b.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	
c.	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	
d.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	
e.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	
f.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	
g.	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	1 Dokumen	
h.	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Provinsi Kepulauan Riau			
3	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
a.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	
b.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0,25 Ha	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
c.	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0,25 Ha	
d.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1 Ha	
e.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	1 Unit	
f.	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Provinsi Kepulauan Riau		500	
g.	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Ha	
h.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	
4	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan		
a.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1 Ha	
b.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1 Operasi	
c.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	
d.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	1 Laporan	
5	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Provinsi Kepulauan Riau	Terkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		
a.	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Provinsi Kepulauan Riau		1	
b.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Managemen	
c.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	
d.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil	Provinsi	Jumlah Unit Managemen PBPHH HHBK Skala Kecil	1 Unit	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Hutan Bukan Kayu	Kepulauan Riau	dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SIRPBBPHH	Managemen	
6	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		
a.	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	1 Unit Managemen	
b.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	
c.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasikan secara Elektronik	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	1 Unit Managemen	
XII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat		
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Provinsi Kepulauan Riau	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan		
a.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Penyuluhan Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	
b.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	
c.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	4 Ha	
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau		
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas	Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kepulauan Riau	Kabupaten/Kota		
a.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	
b.	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	
c.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Provinsi Kepulauan Riau		1	
d.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1 Orang	
e.	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	
f.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Provinsi Kepulauan Riau		2	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau		2 Orang	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup		
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	1 Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau		1	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit I	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Karimun)				
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau		1	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Kepulauan Riau			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	di Bidang Kehutanan (UPTD KPHL Unit II Batam)				
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHL Unit II Batam)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau		1	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN				

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)]	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau		1	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di	Provinsi			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Kepulauan Riau			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana (UPTD KPHP Unit V Natuna) Prasarana Operasionalisasi KPH	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit V	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Natuna)				
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau		1	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	4 Ha	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	
	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas) Prasarana Operasionalisasi KPH	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	12 Unit	
	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan	Provinsi Kepulauan Riau			

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Anambas)				
	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau		1	
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau		4 Ha	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau			
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1 Kelompok	
	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Provinsi Kepulauan Riau	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5 Ha	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi lingkungan hidup dan kehutanan diantaranya adalah :

Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan ikli, yaitu dengan cara ;

- Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
- Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional
- Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilaksanakan dengan strategi,
Kurangnya tutupan vegetasi dan belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam
- Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah
Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

- Peningkatan nilai tambah ekonomi kawasan hutan konservasi
Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan

- Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang diupayakan dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi
Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan hutan untuk meningkatkan nilai ekonomi maupun nilai lingkungan

Tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan

- Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030
Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan
- Penguanan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
Belum optimalnya perencanaan serta pembinaan usaha kehutanan
- Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
Rendahnya presentase terkelolanya hutan konservasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuannya yaitu;

- a) Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari.
- c) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada awal Renstra nilai indeks 69,47 dan pada akhir renstra 70,38. Untuk PDRB Sektor Kehutanan pada awal Renstra 27 Milyar dan pada akhir Renstra 27,50 Milyar. Sedangkan Rehabilitasi Lahan Kritis pada awal Renstra 255 hektar dan pada akhir Renstra 290 Hektar.

3.2.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- a) Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Lestari.
- c) Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Selanjutnya tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana pada awal Renstra nilai indeks 69,47 dan pada akhir renstra 70,38. Untuk PDRB Sektor Kehutanan pada awal Renstra 27 Milyar dan pada akhir Renstra 27,50 Milyar. Sedangkan Rehabilitasi Lahan Kritis pada awal Renstra 255 hektar dan pada akhir Renstra 290 Hektar.

Tabel. 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69.47	69.73	69.95	70.18	70.28	70.38	
		Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	20	20	20	20	20	20	
			Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	0,52	0,74	0,77	0,80	0,83	0,89	
			Indeks Kualitas Air	Indeks	56.60	56.70	56.80	56.90	70.00	70.10	
			Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88.14	88.25	88.35	88.46	88.56	88.67	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59.07	59.08	59.09	59.10	59.11	59.12	
			Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0	14.28	14.28	28.57	42.58	57.17	
			Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	26.27	33.33	33.33	40.00	40.00	46.67	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	28.57	42.85	57.14	71.43	85.71	85.71	
			Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	57.14	57.14	71.43	71.43	85.71	85.71	
			Persentase Pengurangan Sampah	%	24	26	27	28	30	30	
			Persentase Penanganan Sampah	%	74	73	72	71	70	70	
2.	Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari		Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Milliar (Rp)	27.00	27.10	27.20	27.30	27.40	27.50	
	Meningkatnya pemanfaatan Hutan Lestari		Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Milliar (Rp)	27.00	27.10	27.20	27.30	27.40	27.50	
			Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	5	5	10	10	10	10	
			Meningkatnya akses pengelolaan	Ha	500	500	500	500	500	500	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		hutan oleh masyarakat								
			Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	2	2	2	2	2	
3	Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Nilai SAKIP	skor	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nilai SAKIP	skor	B	B	B	B	B	B	

Adapun strategi dan kebijakan yang dapat diacu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai sasaran RPJMN yang telah diamanatkan dalam Nawacita antara lain :

1. Strategi

- a. Mendorong pemanfaatan ruang yang peka terhadap kelestarian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku
- b. Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan melalui perbaikan tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Arah Kebijakan

- a. Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut
- b. Pelaksanaan: (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim
- c. Pengelolaan limbah sluge Oil di Kawasan Pesisir

- d. Pengelolaan ruang terbuka hijau
- e. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan izin pelaku usaha/kegiatan pengelolaan limbah b3
- f. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- g. Penilaian dan Pemantauan, Pendampingan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- h. Penyediaan Prasarana dan Sarana TPA di Provinsi Kepulauan Riau
- i. Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
- j. Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
- k. Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
- l. Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat dan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
- m. Pelaksanaan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
- n. Pelaksanaan Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan
- o. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pemegang Izin Industri Pengolahan Hasi Hutan Kayu Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
- p. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Bidang Kehutanan
- q. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
- r. Pengembangan Perhutanan Sosial
- s. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan DAS
- t. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- u. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengelolaan barang milik daerah, dan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kegiatan dalam Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagai berikut;
 - ✓ Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Kegiatan dalam Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) sebagai berikut;
 - ✓ Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kegiatan dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut;
 - ✓ Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Kegiatan dalam Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagai berikut;
 - ✓ Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - ✓ Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
10. Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan dalam Pengelolaan Persampahan sebagai berikut;
 - ✓ Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
11. Program Pengelolaan Hutan. Kegiatan dalam Program Pengelolaan Hutan sebagai berikut;
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
 - c. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - d. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
12. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan. Kegiatan dalam Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan sebagai berikut;
 - ✓ Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kegiatan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) sebagai berikut; Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2023**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						34.356.312.935				34.023.402.160
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor				33.573.297.193				33.198.149.197
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD		Provinsi Kepulauan Riau		479.320.108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			500.000.000
2 11 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	2	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	75.000.000
2 11 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	200.000.000
2 11 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	204.320.108	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	225.000.000
11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN		Provinsi Kepulauan Riau		27.915.627.009	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.256.507.624
11 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	Provinsi Kepulauan Riau	141	26.723.667.009	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		141	28.724.866.024
11 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	1.191.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	1.191.960.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
				1	2	3	4		5	6
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengadministrasi Barang Milik Daerah		Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			339.681.600
2 11 01 1.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 11 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	50.000.000
11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Provinsi Kepulauan Riau		250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			289.681.600
11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Provinsi Kepulauan Riau	15	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15	150.000.000
3 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Provinsi Kepulauan Riau		1.256.896.275	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			114.681.600
2 11 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi istik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	25.000.000
2 11 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1	63.428.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	63.428.200
2 11 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1	26.253.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	26.253.400
2 11 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	150.000.000
2 11 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	50.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
				1	2	3	4		5	6
2 11 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	44.928.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	144.928.000
2 11 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	100.000.000
2 11 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	24.584.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	24.584.000
2 11 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	752.702.675	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	802.702.675
2 11 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	100.000.000
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Provinsi Kepulauan Riau		804.452.401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			817.095.373
2 11 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	576.000.000
2 11 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Provinsi Kepulauan Riau	1	104.497.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	191.095.373
2 11 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	139.955.401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	50.000.000
2 11 01 1.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	60.000.000
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Provinsi Kepulauan Riau	1	1.931.051.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	194.551.800
2 11 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	35.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	65.000.000
2 11 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	44.551.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	94.551.800
2 11 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	1.786.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	2.086.500.000
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Provinsi Kepulauan Riau		885.949.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			685.949.600
2 11 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	710.949.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	410.949.600
2 11 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	75.000.000
2 11 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	200.000.000
2 11 02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah				177.909.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			192.827.147
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH		Provinsi Kepulauan Riau		77.909.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			132.827.147
2 11 02 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan Hasil Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang Disusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	57.909.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	52.827.147

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 02 1.01 02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi		Provinsi Kepulauan Riau		100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000
2 11 02 1.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun yang Disusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000
2 11 02 1.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 02 1.02 03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	40.000.000
2 11 02 1.02 04	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Provinsi yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut				126.096.046				101.394.318
		Indeks Kualitas Air								
		Indeks Kualitas Udara Ambien								
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan								
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup		Provinsi Kepulauan Riau		56.096.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61.394.318

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 03 1.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	37.699.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	30.000.000
2 11 03 1.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	18.397.046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	31.394.318
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Penanganan Akibat Limbah Sludge Oil di Wilayah Pesisir		Provinsi Kepulauan Riau		35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000
2 11 03 1.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
2 11 03 1.02 02	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	Provinsi Kepulauan Riau	3	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3	20.000.000
2 11 03 1.02 03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 03 1.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup		Provinsi Kepulauan Riau		35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
2 11 03 1.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan								
2 11 03 1.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
2 11 03 1.03 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 03 1.03 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
2 11 03 1.03 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau				73.280.296				89.170.386
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Kepulauan Riau		73.280.296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89.170.386
2 11 04 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
2 11 04 1.01 02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
2 11 04 1.01 03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
				1	2	3	4		5	6
2 11 04 1.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	1	23.280.296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	39.170.386
2 11 04 1.01 05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
2 11 04 1.01 06	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
2 11 04 1.01 07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi				43.846.587				41.777.485
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Ternilainya Pengelolaan Limbah B3 terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki		Provinsi Kepulauan Riau		43.846.587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			41.777.485
2 11 05 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 05 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	23.846.587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	21.777.485
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi				14.494.179				14.027.721
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Provinsi Kepulauan Riau		14.494.179	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.027.721
2 11 06 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.494.179	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.027.721

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 06 1.01 02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	Provinsi Kepulauan Riau	1	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	2.000.000
2 11 06 1.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
2 11 06 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	2.000.000
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan				207.627.507				250.791.711
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Adipura		Provinsi Kepulauan Riau		207.627.507	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			250.791.711
		Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tingkat Provinsi dan atau tingkat Nasional								
		Jumlah orang yang mendapat penghargaan Kalpataru								

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 08 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	Provinsi Kepulauan Riau	2	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	20.000.000
2 11 08 1.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	97.627.507	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	130.000.000
2 11 08 1.01 03	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang	Provinsi Kepulauan Riau	1	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	100.791.711
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan				40.167.383				38.874.698
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Kepulauan Riau		40.167.383	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			38.874.698
2 11 09 1.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Provinsi Kepulauan Riau	10	40.167.383	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		10	38.874.698
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				35.354.432				34.216.640

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Provinsi Kepulauan Riau		35.354.432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			34.216.640
2 11 10 1.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	3	25.354.432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3	24.216.640
2 11 10 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Persentase Penanganan Sampah				64.240.266				62.172.857
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA		Provinsi Kepulauan Riau		64.240.266	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			62.172.857
2 11 11 1.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional yang Disusun dan Ditetapkan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 11 1.01 02	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 11 1.01 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 11 11 1.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 11 1.01 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	24.240.266	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	42.172.857
2 11 11 1.01 06	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	Ton	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
2 11 11 1.01 07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam miliar rupiah) Rehabilitasi Lahan Kritis				222.379.132				1.204.659.861
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau		Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.000.000
3 28 03 1.01 01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.01 02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terkelolaanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung		Provinsi Kepulauan Riau		60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			65.000.000
3 28 03 1.03 01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.03 02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	25.000.000
3 28 03 1.03 03	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.03 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	25.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.03 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
3 28 03 1.03 06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
3 28 03 1.03 07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
3 28 03 1.03 09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Provinsi Kepulauan Riau		40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			25.000.000
3 28 03 1.04 01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.04 02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	0,25	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,25	-
3 28 03 1.04 03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	0,25	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,25	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
				1	2	3	4		5	6
3 28 03 1.04 04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	25.000.000
3 28 03 1.04 05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.04 06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			Provinsi Kepulauan Riau	500	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		500	-
3 28 03 1.04 07	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.04 08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan		Provinsi Kepulauan Riau		50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			422.305.415
3 28 03 1.05 02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	1	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05 03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	Provinsi Kepulauan Riau	1	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05 04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.05 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	20.000.000
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			367.305.415
3 28 03 1.06 01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
3 28 03 1.06 02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
3 28 03 1.06 03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Unit Managemen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
3 28 03 1.06 04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah yang Memiliki Hak Akses SIRPBBPHH	Unit Managemen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	5.000.000
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Provinsi Kepulauan Riau		32.379.132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			305.049.031

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.07 01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	Unit Managemen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
3 28 03 1.07 02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	3	12.379.132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3	22.256.384
3 28 03 1.07 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	Unit Managemen	Provinsi Kepulauan Riau	1	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	10.000.000
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat				124.330.575				87.597.549
3 28 05 1.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan		Provinsi Kepulauan Riau		124.330.575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			87.597.549
3 28 05 1.01 01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluhan Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	Provinsi Kepulauan Riau	15	56.733.026	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	Provinsi Kepulauan Riau	5	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	47.597.549
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	4	37.597.549	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	40.000.000
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau				36.640.149				100.316.684
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Provinsi Kepulauan Riau		36.640.149	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.316.684
3 28 06 1.01 01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 06 1.01 02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 06 1.01 03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 06 1.01 04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	50.000.000
3 28 06 1.01 05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 06 1.01 06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			Provinsi Kepulauan Riau	2	11.640.149	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	50.316.684
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					30.000.009				100.000.009
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)			Provinsi Kepulauan Riau		30.000.009	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			100.000.009
2 11 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)		Orang	Provinsi Kepulauan Riau	2	30.000.009	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	100.000.009
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Ambien Indeks Kualitas Tutupan Lahan				20.000.000				30.000.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup		Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000
2 11 03 1.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD UNIT LABORATORIUM LINGKUNGAN)	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	30.000.000
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					50.000.000				45.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit I Karimun)			Provinsi Kepulauan Riau		30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.000.000
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	12	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	35.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit I Karimun)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit I Karimun)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit I Karimun)			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	4	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	10.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					10.000.000				30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit I Karimun)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					40.000.000				45.000.000
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHL Unit II Batam)			Provinsi Kepulauan Riau		20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.000.000
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	12	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	35.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHL Unit II Batam)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHL Unit II Batam)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHL Unit II Batam)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	4	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	10.000.000
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					10.000.000				30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHL Unit II Batam)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHL Unit II Batam)	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					50.000.000				45.000.000
3 28 03 1,01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit III Lingga)			Provinsi Kepulauan Riau		30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.000.000
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	12	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	35.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit III Lingga)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit III Lingga)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit III Lingga)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	4	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	10.000.000
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					10.000.000				30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit III Lingga)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	Provinsi Kepulauan Riau	2	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	15.000.000
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					50.000.000				45.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)			Provinsi Kepulauan Riau		30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.000.000
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	12	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	35.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	4	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	10.000.000
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					10.000.000				10.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	5.000.000
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	5.000.000
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					55.000.000				55.000.000
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit V Natuna)			Provinsi Kepulauan Riau		35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana (UPTD KPHP Unit V Natuna) Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	12	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	45.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit V Natuna)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit V Natuna)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit V Natuna)			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit V Natuna)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	4	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	10.000.000
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					10.000.000				30.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit V Natuna)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					56.744.855				55.000.000
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)			Provinsi Kepulauan Riau		36.744.855	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			45.000.000
3 28 03 1.01 03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas) Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	Provinsi Kepulauan Riau	12	36.744.855	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12	45.000.000
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
				1	2	3	4		5	6
3 28 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)			Provinsi Kepulauan Riau		5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
3 28 03 1.03 08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)			Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	-
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.000.000
3 28 03 1.05 01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)		Ha	Provinsi Kepulauan Riau	4	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4	10.000.000
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					10.000.000				30.000.000
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)			Provinsi Kepulauan Riau		10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			30.000.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	RENCANA KERJA TAHUN 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
				1	2	3	4		5	6
3 28 05 1.01 02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	Provinsi Kepulauan Riau	1	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1	15.000.000
3 28 05 1.01 03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	Provinsi Kepulauan Riau	5	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5	15.000.000
TOTAL						35.151.407.646				35.995.976.263

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Rencana kerja (Renja) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang telah disusun. Di dalam rencana kerja, Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 adalah sebagai berikut (tabel pada lampiran):

1. Tujuan 1 :

Menurunkan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

Sasaran :

Menurunnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup;

2. Tujuan 2 :

Meningkatkan Pemanfaatan Hutan Lestari;

Sasaran :

Meningkatnya pemanfaatan Hutan Lestari;

3. Tujuan 3 :

Meningkatkan kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program utama Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Hal ini dalam rangka harmonisasi/ keselarasan mulai dari RPJMD, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Program dan kegiatan yang di susun oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga harus mengacu kepada Perpres Nomor 59 tahun 2017, tentang Penerapan Sustainable Development Goals, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global dan mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota serta Mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi pada tahun 2025.

Program dan kegiatan yang dapat di jadikan dasar untuk tujuan SDGs (tujuan 6 yaitu meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global dan tujuan 9 yaitu mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota telah di anggarkan pada tahun anggaran 2023, walaupun tidak semuanya bisa di akomodir. Program dan kegiatan yang telah di akomodir dalam anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagai berikut;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.
 - b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Kegiatan dalam Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) sebagai berikut;
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3). Kegiatan dalam Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) sebagai berikut;
 - a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Kegiatan dalam Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut;
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. Kegiatan dalam Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebagai berikut;
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Kegiatan dalam Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup sebagai berikut;
 - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
10. Program Pengelolaan Persampahan. Kegiatan dalam Pengelolaan Persampahan sebagai berikut;
 - a. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
11. Program Pengelolaan Hutan. Kegiatan dalam Program Pengelolaan Hutan sebagai berikut;
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
 - c. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi.
 - d. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara.
 - e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
12. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan. Kegiatan dalam Program Pendidikan Dan

Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- 13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kegiatan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) sebagai berikut;

Dalam mencapai sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehtuanan Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 adalah **34.376,312,935** dengan jumlah nilai total anggaran pada RPJMD 2023 sebesar Rp. **35.151.407.646** dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a. RencanaPerlindungan dan PengelolaanLingkunganHidup (RPPLH) Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Kajian LingkunganHidupStrategis (KLHS) Provinsi
- 3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 4 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
 - b. Koordinasi Dewan KetahananPangan

- c. Penyusunan Prgram dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 5 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
 - a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 6 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- 7 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
- 8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
- 9 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
- 10 Program Pengelolaan Persampahan
 - a. Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
- 11 Program Pengelolaan Hutan
 - a. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - b. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - c. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - d. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - e. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - f. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi<6000 m³/Tahun

12 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

a. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

13 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

a. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Selengkapnya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Th. 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				35.151.407.646				
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	33.623.977.085				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Capaian Kinerja OPD	Dokumen	1	500.000.000				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Rencana Kerja OPD	Dokumen	1	75.000.000				
		Jumlah Lakip OPD	Dokumen	1					
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	1	200.000.000				
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pencapaian Monev Pembinaan Kab/Kota	Laporan	1	225.000.000				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan, serta Administrasi Keuangan ASN	Tahun	1	27.915.627.009				
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	26.723.667.009				
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tahun	1	1.191.960.000				
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengadministrasi Barang Milik Daerah	Tahun	1	50.000.000				
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Kondisi Barang	Tahun	0	0				
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan terhadap Barang Milik OPD	Tahun	1	50.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Pegawai	Orang	15	280.000.000				
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	Orang	15	250.000.000				
		Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Bank Sampah Unit se Provinsi Kepulauan Riau	Kali	1					
9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Jumlah Pelatihan/ In House Training SDM Laboratorium Lingkungan	Kali	2	30.000.000				
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pangadministrasian Kantor	Tahun	1	1.256.896.275				
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Komponen Instalasi Listrik	Paket	1	25.000.000				
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	63.428.200				
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Kebersihan	Paket	1	26.253.400				
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat-alat Pelindung Diri Covid 19	Paket	1	150.000.000				
		Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Paket	1					
14	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetak dan Penggandaan Kantor	Paket	1	50.000.000				
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Pemenuhan Bahan Bacaan Kantor	Paket	1	44.928.000				
16	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan Material	Paket	1	50.000.000				
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	1	24.584.000				
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Paket	1	752.702.675				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		SKPD							
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya Penata Usahaan Arsip	Tahun	1	70.000.000				
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1	804.452.401				
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Paket	1	500.000.000				
21	Pengadaan Mebel	Jumlah Tersedianya Mebel	Paket	1	104.497.000				
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	139.955.401				
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Tahun	1	60.000.000				
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Pelayanan Kantor	1 Tahun	1	1.931.051.800				
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Jasa Pengiriman Surat	Tahun	1	35.000.000				
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Air Bersih dan TV Kabel	Paket	1	65.000.000				
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun	1	44.551.800				
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun	1	1.786.500.000				
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1	885.949.600				
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan terhadap Kendaraan Dinas	Tahun	1	710.949.600				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
29	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	Tahun	1	150.000.000				
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tahun	1	25.000.000				
	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Percentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	100%	100%	157.909.046				
9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH	Dokumen	1	57.909.046				
31	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung LH	Laporan	1	57.909.046				
		Jumlah Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung LH							
32	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian terhadap Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Laporan	1	20.000.000				
10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategi Provinsi	Dokumen	1	100.000.000				
33	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Laporan KLHS untuk Rencana Tata Ruang	Laporan	1	20.000.000				
34	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Laporan KLHS untuk RPJPD/RPJMD	Laporan	1	20.000.000				
35	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Laporan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Laporan	1	40.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
36	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko LH	Laporan	1	20.000.000				
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	77,39	146.096.046				
		Indeks Kualitas Air	Indeks	56,80					
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	88,35					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,09					
11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan	1	76.096.046				
37	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Laporan hasil Pengamatan: (1) Air Bersih, (2) Udara Ambien, (3) Tutupan Lahan, dan (4) Air Laut	Laporan	1	37.699.000				
38	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Laporan (1) Penyusunan Inventarisasi GRK, dan (2) Pembinaan Kampung Iklim	Laporan	1	18.397.046				
39	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi (UPTD Laboratorium Lingkungan)	Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Laporan	0	20.000.000				
12	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terkendalinya Penanganan Akibat Limbah Sludge Oil di Wilayah Pesisir	Paket	1	35.000.000				
40	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH pada Masyarakat	Jumlah Laporan Penyusunan: (1) IKLH dan (2) IKPLHD	Laporan	1	10.000.000				
41	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang terkelola Limbah Sludge Oilnya	Kab/Kota	300%	20.000.000				
42	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan Penghentian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Paket	100%	5.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
13	Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran kerusakan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	35.000.000				
43	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Laporan Penghentian Sumber Pencemaran	Laporan	1	5.000.000				
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Laporan Pembersihan Unsur Pencemar	Laporan	1	5.000.000				
45	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Remediasi	Laporan	1	5.000.000				
46	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rehabilitasi	Laporan	1	10.000.000				
47	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Restorasi	Laporan	1	10.000.000				
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	14,28%	14,28%	73.280.296				
14	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	Dokumen	1 Dokumen	73.280.296				
48	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen	1	10.000.000				
49	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Kab/Kota yang di kelola Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Kab/Kota	1	10.000.000				
50	Pengelolaan Kebun Raya	Jumlah Kebun Raya yang dikelola	Kab/Kota	1	10.000.000				
51	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola	Lokasi	1	23.280.296				
52	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati yang terkelola	Lokasi	1	5.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
53	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kelompok	1	10.000.000				
54	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang terkelola	Paket	1	5.000.000				
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Percentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	33,33%	33,33%	43.166.695				
15	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan dan Ternilainya Pengelolaan Limbah B3 terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang dimiliki	Perusahaan	5	43.166.695				
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Pelaku Usaha/ Perusahaan yang di monitoring dan diawasi dalam kegiatan Pengelolaan Limbah B3	Perusahaan	5	23.166.695				
		Jumlah Peralatan Penanganan Limbah B3	Paket	1					
56	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Koordinasi Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Paket	1	20.000.000				
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100%	14.494.179				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	HIDUP (PPLH)								
16	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dibinadan diawasi Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Perusahaan	5	14.494.179				
57	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Perusahaan yang Taat Peraturan yang berlaku	Perusahaan	1	5.494.179				
58	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang meningkat kapasitasnya	Orang	1	2.000.000				
59	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang diawasi terhadap Izin yang sudah diterbitkan	Perusahaan	1	5.000.000				
60	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Kali	1	2.000.000				
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	57,14%	207.627.507				
17	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat penghargaan Adipura	Kab/Kota	5	207.627.507				
		Jumlah sekolah yang mendapat penghargaan Adiwiyata di Tingkat Provinsi dan atau	Sekolah	10					

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		tingkat Nasional							
		Jumlah orang yang mendapat penghargaan Kalpataru	Paket	1					
61	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitas dan kompetensinya	Kelompok	1	50.000.000				
62	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	jumlah Penilaian dan Pemantauan, Pendampingan (Adipura, Adiwiyata, Kalpataru) Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Paket	1	97.627.507				
63	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Peringatan Hari Lingkungan Hidup/ Hari Peduli Sampah Nasional/Hari Bakti Rimbawan/Hari Menanam	Paket	1	60.000.000				
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	100%	100%	40.167.383				
18	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau	100%	100%	40.167.383				
64	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Perusahaan yang dini;ai kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan LH	Perusahaan	10	40.167.383				
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	71,43%	35.354.432				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
19	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan dan tindak pidana serta sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus	7	35.354.432				
65	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah tindak lanjut pengaduan	Kasus	3	25.354.432				
66	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa baik didalam maupun diluar pengadilan	Laporan	1	10.000.000				
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah	%	27	64.240.266				
		Persentase Penanganan Sampah	%	72					
20	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Penanganan Sampah di TPA	Paket	1	64.240.266				
67	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Pengelolaan TPA Regional	Dokumen	1	10.000.000				
68	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah Pemrosesan Akhir di TPA/TPST	Paket	1	5.000.000				
69	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Pemeliharaan TPA/TPST	Paket	1	5.000.000				
70	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Paket	1	5.000.000				
71	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di	Paket	1	24.240.266				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		TPA/TPST Regional							
72	Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kab/ Kota	1	5.000.000				
73	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Prasarana dan Sarana TPA/TPST Regional di Provinsi Kepulauan Riau	Paket	1	10.000.000				
BIDANG KEHUTANAN									
XI	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan (dalam milyar rupiah)		27,20	524.123.987				
		Rehabilitasi Lahan Kritis	Ha	5,00					
21	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Rencana Tata Hutan KPH di Provinsi Kepulauan Riau	Tahun	1	201.744.855				
74	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah	Dokumen	1	5.000.000				
75	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Laporan Pembagian blok Pengelolaan Hutan KPH	Laporan	1	5.000.000				
76	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	Bulan	12	30.000.000				
77	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	Bulan	12	20.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
78	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	Bulan	12	30.000.000				
79	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	Bulan	12	30.000.000				
80	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	Bulan	12	35.000.000				
81	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Terpenuhinya kebutuhan operasional KPH	Bulan	12	36.744.855				
82	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Peta serta Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan	Dokumen	1	10.000.000				
22	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Perencanaan di KPH	Dokumen	1	30.000.000				
83	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Dokumen	1	5.000.000				
84	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Dokumen	1	5.000.000				
85	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Dokumen	1	5.000.000				
86	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Dokumen	1	5.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
87	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Dokumen	1	5.000.000				
88	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Anambas)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan KPH	Dokumen	1	5.000.000				
23	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terkelolanya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	Paket	1	90.000.000				
89	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Laporan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Laporan	1	5.000.000				
90	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Laporan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Laporan	1	15.000.000				
91	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Laporan Kerjasama Melalui Sistem Elektronik	Laporan	1	5.000.000				
92	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kali	1	15.000.000				
		2. Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi peraturan terkait penatausahaan hasil hutan pada Hutan Produksi	Pelaku Usaha	5					

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
93	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Lindung	Kali	1	5.000.000				
94	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi sesuai Ketentuan yang berlaku	Dokumen	1	5.000.000				
95	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung sesuai Ketentuan yang berlaku	Dokumen	1	5.000.000				
96	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Paket	1	5.000.000				
97	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Laporan	1	5.000.000				
98	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Laporan	1	5.000.000				
99	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Laporan	1	5.000.000				
100	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Laporan	1	5.000.000				
101	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah laporan pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Laporan	1	5.000.000				
102	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Pengembangan Pemanfaatan hasil Hutan kayu	Laporan	1	5.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
24	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Terpenuhinya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Paket	1	40.000.000				
103	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Dokumen	1	5.000.000				
104	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Hektar	0,25	5.000.000				
105	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara yang terbangun	Hektar	0,25	5.000.000				
106	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Hektar	1	5.000.000				
107	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Laporan	1	5.000.000				
108	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit yang dihasilkan untuk Rehabilitasi Lahan	Batang	500	5.000.000				
109	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dikembangkan	1 Paket	1 Paket	5.000.000				
110	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan atas hasil Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan	1	5.000.000				
25	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Hutan	Tahun	1	110.000.000				
111	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	Kali	4	10.000.000				
112	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	Kali	4	10.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
113	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	Kali	4	10.000.000				
114	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	Kali	4	10.000.000				
115	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	Kali	4	10.000.000				
116	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah Patroli Pencegahan Kerusakan Hutan	Kali	4	10.000.000				
117	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab/Kota	1	15.000.000				
117	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kab/Kota	1	15.000.000				
118	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	Kali	1	10.000.000				
119	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kali	1	10.000.000				
26	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Terkelolanya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Paket	1	20.000.000				
120	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Laporan pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Laporan	1	5.000.000				
121	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK)	Laporan	1	5.000.000				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
122	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah laporan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu	Laporan	1	5.000.000				
123	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah laporan pengawasan Pelaku Usaha yang diawasi izin pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Laporan	1	5.000.000				
27	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Paket	1	32.379.132				
124	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah dokumen rencana pengolahan hasil hutan kayu	Dokumen	1	10.000.000				
125	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah izin usaha atas Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Pemegang Izin	3	12.379.132				
126	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin baru	Izin Baru	1	10.000.000				
XII	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500	184.330.575				
28	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat pada wilayah kelola KPH di Bidang Kehutanan	6 KPH	6	184.330.575				
127	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan Kehutanan dan SDM Bidang	Jumlah penyuluhan/SDM Bidang Kehutanan yang meningkat	Orang	15 Orang	56.733.026				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
	Kehutanan	kapasitas dan kompetensinya							
128	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok Tani Hutan	5	30.000.000				
129	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok Tani Hutan	5	5.000.000				
130	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok Tani Hutan	5	5.000.000				
131	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok Tani Hutan	2	5.000.000				
132	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok Tani Hutan	8	5.000.000				
133	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok Tani Hutan	6	5.000.000				
134	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mendapatkan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok Tani Hutan	1	5.000.000				
135	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	kali	4	37.597.549				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
136	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun)	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit I Karimun)	kali	5	5.000.000				
137	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHL Unit II Batam)	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHL Unit II Batam)	kali	5	5.000.000				
138	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga)	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit III Lingga)	kali	5	5.000.000				
140	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit IV Bintan-Tanjungpinang)	kali	5	5.000.000				
141	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna)	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit V Natuna)	kali	5	5.000.000				
142	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (UPTD KPHP Unit VI Kepulauan Anambas)	kali	5	5.000.000				
XIII	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	36.640.149				
29	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	1	36.640.149				

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2023		Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
				Target Capaian 2023	Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
143	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan DAS	Laporan	1	5.000.000				
144	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Laporan Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Laporan	1	5.000.000				
145	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah lokasi yang dikonservasi	1 Lokasi	1 Lokasi	5.000.000				
146	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengelolaan DAS	Kelompok Masyarakat	1	5.000.000				
147	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Koordinasi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	kali	1	5.000.000				
148	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengelolaan DAS	kali	2	11.640.149				
					35.151.407.646				

BAB V PENUTUP

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sudah mengacu kepada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021. Program Kerja 2023 (13 Program, 30 Kegiatan dan 147 Sub Kegiatan) dengan total usulan Anggaran sebesar Rp. 35.151.407.646,- dengan rincian jumlah nilai total anggaran pada RPJMD 2023.

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja yang dituang kandalam program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau maka diperlukan adanya komitmen baik dilingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau maupun pihak yang terkait.

Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau TA 2023 ini dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Kepulauan Riau,

